

BAB I

LATAR BELAKANG

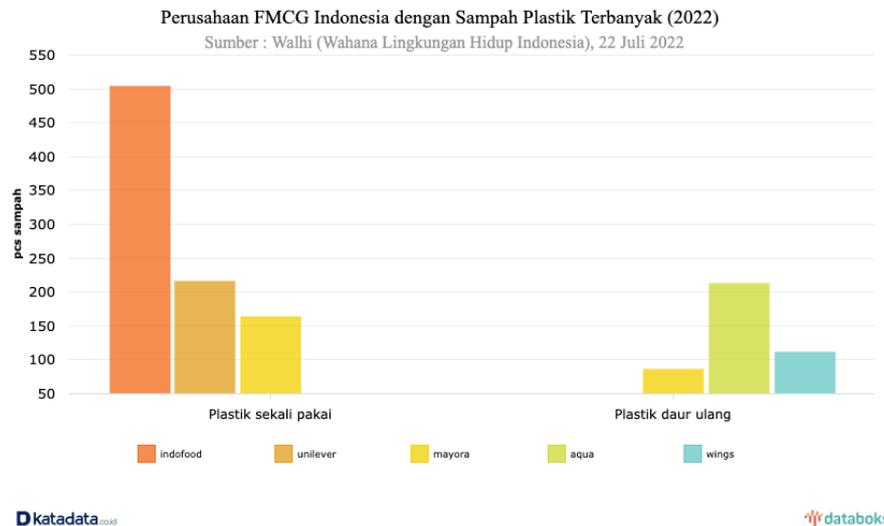
1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perhatian dunia semakin meningkat terhadap isu-isu keberlanjutan yang salah satunya ditunjukkan dengan munculnya pengungkapan *Corporate Sustainability Report* perusahaan, sehingga meningkatkan permintaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan untuk lebih mengungkap aspek-aspek keberlanjutan dalam kegiatan operasional perusahaan. Aspek keberlanjutan ini terdiri dari tiga komponen biasa disebut dengan ESG, yaitu lingkungan (*environment*), sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*) perusahaan. Negara-negara berkembang di Asia khususnya Indonesia, menjadikan isu lingkungan sebagai perhatian utama karena ancaman perubahan iklim yang semakin besar, sehingga faktor-faktor tersebut memiliki bobot yang sama pentingnya dalam diskusi keberlanjutan tiap perusahaan.

Di negara-negara berkembang sendiri, tren investasi keberlanjutan cenderung terlambat dibandingkan dengan negara-negara maju. Ledakan populasi yang terjadi di negara-negara berkembang dengan jumlah populasi penduduk muda yang lebih banyak tentu akan menambah beban pada sumber daya alam seperti air, pangan, energi, dan lain-lain. Tantangan ini bisa meningkatkan risiko investasi di negara berkembang.

Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* merupakan emiten dengan prospek yang cukup baik bagi investor karena saham-sahamnya masih menawarkan potensi kenaikan. Produk dari perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* sangat erat dengan masyarakat karena sebagian besar produknya digunakan oleh masyarakat. Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* juga dianggap dapat bertahan dalam krisis global karena sektor tersebut tergolong dalam sektor yang stabil, selalu tumbuh dan berkembang seiring meningkatnya populasi penduduk (Amira & Siswanto, 2022). Di samping hal tersebut, kekurangan dari perusahaan sektor

consumer non-cyclicals yaitu sangat erat kaitannya dengan permasalahan lingkungan, mengingat limbah-limbah yang dihasilkan dari perusahaan tersebut.



**Gambar 1.1 Perusahaan FMCG Indonesia dengan Sampah Plastik
Terbanyak**

Sumber: databoks.katadata.co.id

Berdasarkan Gambar 1.1, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama Aliansi Zero Waste Indonesia telah melakukan investigasi di 11 pesisir pantai Indonesia pada tahun 2022. Dari hasil investigasi tersebut ditemukan bahwa setidaknya terdapat 16.519 buah sampah dengan berat 201,3 kilogram (kg). Sebanyak 79,7% sampah yang ditemukan berbentuk sampah plastik sekali pakai. Sedangkan 9,2% sampah yang ditemukan berbentuk sampah plastik daur ulang. Tim investigasi setidaknya menemukan polutan sampah plastik sekali pakai sebesar 504 buah sampah produk Indofood, 216 buah sampah produk Unilever, dan 164 buah sampah produk Mayora. Selanjutnya, polutan sampah plastik daur ulang sebesar 213 buah sampah produk Aqua, 111 buah sampah produk Wings Food, dan 86 buah sampah produk Mayora.

Bursa Efek Indonesia telah menetapkan 12 sub-sektor *consumer non-cyclicals*, yaitu sub-sektor ritel & distributor obat-obatan, sub-sektor ritel & distributor makanan, sub-sektor supermarket, sub-sektor minuman keras, sub-sektor minuman ringan, sub-sektor produk susu olahan, sub-sektor makanan olahan, sub-sektor ikan,

daging, & produk unggas, sub-sektor perkebunan & tanaman pangan, sub-sektor rokok, sub-sektor keperluan rumah tangga, dan sub-sektor produk perawatan tubuh.

Tabel 1. 1 Jumlah Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* BEI 2021

No.	Jenis Perusahaan Sektor Konsumen Primer	Jumlah
1	Sub-sektor ritel & distributor obat-obatan	3
2	Sub-sektor ritel & distributor makanan	5
3	Sub-sektor supermarket	5
4	Sub-sektor minuman keras	2
5	Sub-sektor minuman ringan	3
6	Sub-sektor produk susu olahan	4
7	Sub-sektor makanan olahan	24
8	Sub-sektor ikan, daging, & produk unggas	15
9	Sub-sektor perkebunan & tanaman pangan	32
10	Sub-sektor rokok	5
11	Sub-sektor keperluan rumah tangga	2
12	Sub-sektor produk perawatan tubuh	9
Total		109

Sumber: Sahamu.com (2021)

1.2 Latar Belakang

ESG merupakan suatu istilah yang digunakan oleh *capital market* untuk mengetahui kinerja non-keuangan perusahaan, seperti kinerja lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*) perusahaan. ESG perusahaan berbentuk *disclosure* atau pengungkapan yang merupakan alat perusahaan untuk mengkomunikasikan kepada *primary* dan *secondary* stakeholder tentang *Environmental, Social, and Governance* perusahaan (Roestanto et al., 2022). ESG *disclosure* adalah bentuk terbaru dari pengembangan *information voluntary disclosure*, yang dimulai dari pelaporan CSR mandiri, pelaporan keberlanjutan dan selanjutnya diikuti dengan pelaporan terintegrasi, yang dimana skor tersebut terbagi menjadi tiga aspek yaitu *environmental, social, and*

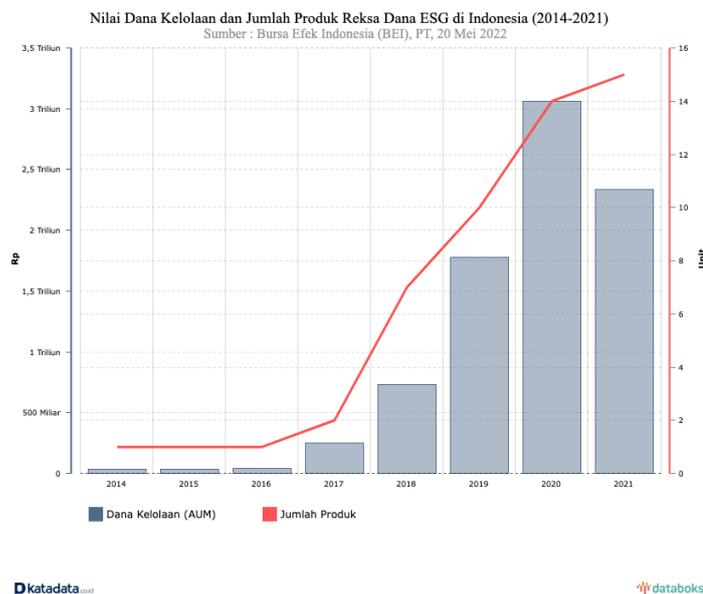
governance. ESG *score* dapat digunakan untuk mengukur pengungkapan ESG karena skor tersebut diperoleh berdasarkan data yang diungkapkan oleh perusahaan secara transparan dan objektif. Perusahaan dengan pengungkapan ESG mampu meningkatkan jumlah model ekuitas yang secara signifikan lebih besar daripada perusahaan yang tidak mengungkapkan ESG.

Pengungkapan ESG dalam hal sosial bisa menambah nilai positif dari perusahaan karena pihak eksternal akan memberikan tanggapan mengenai tanggapan etika yang digunakan perusahaan terkait dengan hubungan perusahaan dengan masyarakat. Pengungkapan sosial perusahaan bertambah tinggi seiring dengan semakin tingginya pengungkapan perusahaan di pasar modal (Risma Septiana & Puspawati, 2022). Pengungkapan sosial mengenai ESG dapat ditemukan informasi mengenai isu-isu yang dihadapi oleh perusahaan, baik yang dihadapi pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Berdasarkan pengungkapan isu tersebut, dapat menjadi tolak ukur serta dasar bagi pemangku jabatan, baik karyawan maupun stakeholders untuk menyelesaikan masalah dana atau membuat kebijakan. Sedangkan dalam tata kelola perusahaan sendiri praktiknya lebih melonggarkan hak kontrol kepada manajemen, sehingga manajemen menyesuaikan keadaan dan menentukan strategi yang paling tepat dalam menghadapi masalah untuk mewujudkan peningkatan nilai ekonomi di pasar modal.

Aspek ESG perusahaan juga tidak lepas dari perhatian investor. Pada tahun 2013 terdapat 52% investor yang mengatakan bahwa informasi non-keuangan memainkan peran yang penting. Pada tahun 2015, angka tersebut meningkat menjadi 58% dan 68% di tahun 2016 (Ernst & Young, 2017) . Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Ernst & Young* terhadap 320 investor institusional, ditemukan tren yang meningkat terkait pengaruh kinerja non-keuangan perusahaan dalam keputusan investasi dalam 12 bulan terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor ESG semakin memainkan peran dalam pembuatan keputusan investasi. Minat investor pada instrumen berbasis ESG kian naik karena terjadinya peningkatan AUM (*asset under management*) atas reksadana dan ITF (*inflation targeting framework*) berbasis indeks dengan ESG pada 5 tahun terakhir (majalahcsr, 2022). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BEI bersama *Asian*

Exchanges untuk investor di Indonesia pada 2022, bahwa permasalahan yang sering dihadapi para investor tersebut diantaranya masih terbatasnya informasi ESG yang tersedia untuk publik, tingkat persiapan perusahaan yang masih cukup rendah dalam mengintegrasikan aspek ESG ke dalam internal perusahaan dan tantangan dalam mengumpulkan data dengan standar informasi yang sama.

Investor dan para pemangku kepentingan lainnya memiliki kemudahan dalam menilai komitmen perusahaan-perusahaan di dunia terhadap aspek ESG. Berbagai institusi menyediakan indeks ESG yang memuat nilai kinerja ESG masing-masing perusahaan seperti Thomson Reuters, Bloomberg, MSCI, dan lain-lain. Indeks ESG ini ditujukan bagi para investor untuk memitigasi risiko investasi pada sebuah perusahaan yang terkait dengan risiko ESG. Lembaga institusi tersebut mengumpulkan informasi mengenai aspek keberlanjutan tiap perusahaan dari data publik yang tersedia, termasuk *sustainability report* perusahaan.



Gambar 1.2 Tren Investasi ESG di Indonesia

Sumber: *databoks.katadata.co.id* (2022)

Berdasarkan Gambar 1.2, tren investasi berbasis prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di Indonesia terus mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tahun 2014 saat pertama kali

diluncurkan terdapat satu produk reksa dana ESG dengan nilai dana kelolaan (*asset under management/AUM*) sebesar Rp38 miliar. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya jumlah produk dan nilai dana kelolaan mengalami peningkatan seperti yang dapat dilihat grafik.

Indonesia tengah menghadapi isu-isu pencemaran lingkungan yang salah satu penyebabnya berasal dari perusahaan di Indonesia. Regulasi pemerintah yang terdiri dari aturan dan undang-undang mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap *Environmental, Social, and Governance* tertuang pada peraturan Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 47 Pasal 4 Ayat 1 Tahun 2012, tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. UU No. 25 Pasal 15 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 21 Tahun 2015, tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55 Tahun 2016, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Regulasi yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintahan tersebut perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan SDA wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang dimana kewajiban tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat keberhasilan perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nicolo et al. (2023) pelaporan ESG telah menjadi praktik yang dilembagakan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi investor baru dan pemangku kepentingan lainnya tentang aktivitas ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola, karena kekhawatiran keberlanjutan menjadi semakin relevan bagi masyarakat dan pasar modal. CFA Institute (2008) (dalam Syafrullah & Muharam, 2017) menjelaskan tentang indikator pada variabel ESG dengan memerhatikan aspek-aspek yang ada di dalamnya. Pada indikator kinerja lingkungan diukur dengan menggunakan *environmental disclosure score*. Indikator kinerja sosial diukur dengan menggunakan *social disclosure score*. Sedangkan indikator kinerja tata kelola perusahaan diukur dengan menggunakan *governance*

disclosure score. GRI (*Global Report Initiative*) merupakan pedoman yang digunakan untuk melakukan pengungkapan ESG yang baik dan benar (Risma Septiana & Puspawati, 2022). Semakin banyak penelitian yang membahas tentang pentingnya menetapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang sehat dan menentukan komposisi dewan direksi yang sesuai untuk memastikan bahwa kekhawatiran masyarakat tentang isu-isu ESG akan ditangani secara memadai dalam pengungkapan perusahaan (Nicolo et al., 2023).

Good Corporate Governance (GCG) adalah seperangkat regulasi yang menentukan hubungan hak dan kewajiban antara pemegang saham, pengurus (pengelola), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, pemegang kepentingan internal serta eksternal atau sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2021). Tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan menerapkan prinsip dari konsep transparansi dan akuntabilitas. Sistem tata kelola perusahaan yang baik akan menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, maka dari itu *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya memberikan dampak positif bagi pemegang saham tetapi juga bagi para pemangku kepentingan terutama masyarakat luas yang mendukung perekonomian nasional (Budiman & Krisnawati, 2021). Tujuan dari penerapan GCG adalah untuk mengontrol dan menjadi pedoman bagi perusahaan agar tetap beroperasi sesuai dengan tujuan stakeholders serta menjadi nilai lebih bagi perusahaan (Arofah & Khomsiyah, 2023). Pengungkapan ESG tidak lepas dari proses dan persetujuan dari peran penting berbagai pihak yang memangku jabatan di perusahaan, seperti Dewan Komisaris, Komisaris Wanita, Komisaris Independen, dan Komite Audit.

Ukuran Dewan (*Board Size*) merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan (Honi et al., 2020). Dalam suatu perusahaan, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari principal dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Dewan komisaris menjadi jembatan kepentingan prinsipal dan manajer di dalam perusahaan. Semakin bertambah dewan komisaris dalam perusahaan maka pengawasan terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan akan semakin

ketat, sehingga dapat menambah nilai perusahaan di mata *stakeholders* (Risma Septiana & Puspawati, 2022). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adiasih & Lianawati (2020) menunjukkan hasil bahwa Dewan Komisaris (*Board Size*) berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Risma Septiana & Puspawati, 2022) menunjukkan hasil bahwa Dewan Komisaris (*Board Size*) tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG.

Dewan Direksi Perempuan (*Women on the Board*) merupakan presentase wanita yang menempati posisi dewan direksi saat akhir tahun fiskal atau presentase dewan direksi saat tanggal pengajuan terakhir (Risma Septiana & Puspawati et al, 2023). Keberadaan wanita dalam manajemen dipercaya mampu mengendalikan suatu keadaan, karena wanita cenderung lebih independen, fleksibel, dan berfikiran luas. Peran *gender* tradisional menunjukkan bahwa perempuan tidak akan diwakilkan dalam dewan perusahaan karena semakin tinggi jarak kekuasaan semakin rendah persyaratan mengenai pemisahan *gender* dalam dewan direksi. Penelitian yang dilakukan oleh Robi Nurwahyudi (2020) menunjukkan hasil bahwa Dewan Direksi Perempuan (*Women on the Board*) berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adiasih & Lianawati (2020) menunjukkan hasil bahwa Dewan Direksi Perempuan (*Women on the Board*) berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ESG.

Komisaris Independen (*Independent Commissioner*) merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Menurut Triyanti (2020), komisaris independen memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan *corporate governance* karena keberadaan dewan komisaris belum dapat memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip *corporate governance*, khususnya mengenai perlindungan terhadap investor. Semakin bertambahnya anggota komisaris independen (*Independent Commissioner*) dinilai komunikasi terhadap pengungkapan ESG akan lebih lengkap karena komisaris independen mampu menilai kepedulian terhadap masyarakat dan

pemangku kepentingan lainnya secara lebih utama. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tawaqal (2022) menunjukkan hasil bahwa Komisaris Independen (*Independent Commissioner*) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Risma & Puspawati (2022) menunjukkan hasil bahwa Komisaris Independen (*Independent Commissioner*) memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ESG.

Komite Audit (*Audit Committee*) merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para pemangku kepentingan (Sunarsih et al., 2021). Berdasarkan tugasnya, komite audit dinilai dapat memperkecil resiko manipulasi laporan keuangan perusahaan yang bersifat adil, terbuka, dan transparan serta pengungkapan informasi yang sesuai (Nurbaiti et al., 2021). Dalam hal pengawasan dan pengendalian perusahaan, komite audit berperan penting guna menambah efektifitas pengawasan termasuk praktik dan pengungkapan lingkungan di perusahaan (Suprpti et al., 2019). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suprpti (2019) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Josua & Septiani, 2022) menunjukkan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG.

Penelitian terdahulu yang membahas terkait analisis *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan ESG di Indonesia tahun 2016-2020 (Risma Septiana & Puspawati et al., 2022) menunjukkan bahwa *Board Size*, *Women on The Board*, dan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Sedangkan *Independent Commissioner* dan Komite Remunerasi berpengaruh terhadap ESG. Penelitian lain yang membahas terkait pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Environmental Disclosure* (Suprpti et al., 2019) menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*. Sedangkan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*.

Penelitian untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun, masih terdapat inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *ESG Disclosure* di Indonesia (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)”**.

1.3 Rumusan Masalah

Pada saat ini tren investasi berbasis prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di Indonesia terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Namun, pada kenyataannya perusahaan di Indonesia sendiri masih rendah kesadaran terhadap pengungkapan ESG. Perusahaan dengan pengungkapan ESG mampu meningkatkan jumlah model ekuitas yang secara signifikan lebih besar daripada perusahaan yang tidak mengungkapkan ESG.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, Indonesia tengah menghadapi isu-isu pencemaran lingkungan yang salah satu penyebabnya berasal dari perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di Indonesia. Regulasi pemerintah yang terdiri dari aturan dan undang-undang mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap *Environmental, Social, and Governance* tertuang pada peraturan Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 47 Pasal 4 Ayat 1 Tahun 2012, tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dari isu permasalahan tersebut, peran *Good Corporate Governance* pada perusahaan Indonesia memiliki peran penting berbagai pihak yang memangku jabatan di perusahaan, seperti Dewan Komisaris, Komisaris Wanita, Komisaris Independen, dan Komite Audit untuk melakukan proses dan persetujuan untuk melakukan pengungkapan ESG.

Penulis ingin mengkaji ulang tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *ESG Disclosure*, dikarenakan masih terdapat inkonsistensi dalam hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka terdapat beberapa pertanyaan tentang penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *Good Corporate Governance* dan *Environmental, Social, and Governance Disclosure* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
2. Apakah *Good Corporate Governance* (*board size, women on the board, independent commissioner, dan audit committee*) berpengaruh secara simultan terhadap *Environmental, Social, and Governance Disclosure* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
3. Apakah secara parsial:
 - a. Ukuran Dewan (*Board Size*) berpengaruh terhadap *ESG Disclosure* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
 - b. Dewan Direksi Perempuan (*Women on the Board*) berpengaruh terhadap *ESG Disclosure* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
 - c. Komisaris Independen (*Independent Commissioner*) berpengaruh terhadap *ESG Disclosure* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
 - d. Komite Audit (*Audit Committee*) berpengaruh terhadap *ESG Disclosure* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, penulis telah menetapkan beberapa tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini, tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *Good Corporate Governance* dan *Environmental, Social, and Governance Disclosure* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* (*board size, women on the board, independent commissioner, dan audit committee*) berpengaruh secara simultan terhadap *Environmental, Social, and Governance*

Disclosure pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.

3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
 - a. Pengaruh Ukuran Dewan (*Board Size*) terhadap *ESG Disclosure* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
 - b. Pengaruh Dewan Direksi Perempuan (*Women on the Board*) terhadap *ESG Disclosure* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
 - c. Pengaruh Komisaris Independen (*Independent Commissioner*) terhadap *ESG Disclosure* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
 - d. Pengaruh Komite Audit (*Audit Committee*) terhadap *ESG Disclosure* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya, penulis membagi pembaca ke dalam dua aspek, yaitu:

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi pihak akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengembangan dalam ilmu akuntansi khususnya mengenai *Environmental, Social, and Governance* dengan beberapa variabel dependen yang berpengaruh terhadap *Environmental, Social, and Governance disclosure*.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kesadaran dan menjadi bahan evaluasi kinerja perusahaan terhadap *Environmental, Social, and Governance disclosure*.
2. Bagi *shareholder*, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada *shareholder* mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

Environmental, Social, and Governance disclosure untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir. Berikut adalah sistematika penulisan tugas akhir yang terdiri dari Bab I sampai Bab V:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara umum, ringkas, padat, dan tepat mengenai isi penelitian. Bab ini berisikan: Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan secara ringkas dan jelas mengenai *Good Corporate Governance* berdasarkan teori-teori yang ada. Kemudian peneliti juga menguraikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai acuan untuk melakukan penelitian. Selanjutnya dibuatlah kerangka pemikiran untuk menggambarkan masalah penelitian berdasarkan penguraian kerangka pemikiran peneliti. Yang terakhir dibuatlah hipotesis sebagai jawaban sementara dari masalah penelitian dan dijadikan sebagai acuan dalam pengujian data.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penulisan penelitian untuk mendapatkan jawaban dari masalah penelitian. Bab ini berisikan: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel (kuantitatif) atau Situasi Sosial (kualitatif), Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dari data-data yang telah dikumpulkan serta berisikan analisis atau pembahasan berdasarkan hasil penelitian. Bab ini juga menjelaskan hasil penelitian secara deskriptif mengenai pengaruh variabel independen (*Good Corporate Governance*) terhadap variabel dependen *Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian. Bab ini juga memberikan saran dari peneliti mengenai manfaat penelitian untuk aspek teoritis dan praktis.